

**CINA DI UJUNG TIMUR JAWA:
DARI PEMEGANG KONTRAK SAMPAI BUPATI
PADA AKHIR ABAD XVIII HINGGA AWAL ABAD XIX**

**CHINESE IN THE EAST FRONTIER OF JAVA: FROM CONTRACT HANDLERS
TO REGENT IN THE LATE OF XVIII CENTURY UNTIL THE EARLY OF XIX
CENTURY**

Retno Winarni, Bambang Samsu Badriyanto, dan Edy Burhan Arifin
Fakultas Sastra Universitas Jember
Pos-el: retnowinarni122@yahoo.com, bambangsamsu@yahoo.co.id,
edyburhan45@yahoo.co.id

Abstrak

Orang Cina dianggap sebagai orang asing di Karesidenan Besuki, terlepas bahwa mereka telah bermukim di pesisir utara Jawa, bahkan beberapa dari mereka menjadi penguasa di lahan swasta di wilayah ini. Artikel ini mengidentifikasi dan mendeskripsikan mengapa mereka mampu menjadi penguasa di wilayah ini dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Masalah yang dibahas adalah hubungan antara penguasa Cina dan pemerintah pribumi serta hubungan mereka dengan masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara pemegang kontrak Cina (tuan tanah) dan penguasa Cina. Mereka dibedakan oleh cara memperoleh lahan luas dan memperoleh kekuasaan. Tuan tanah memiliki hak untuk mengelola lahan luas dengan menyewa atau membeli dari pemerintah kolonial. Sementara, penguasa Cina dipromosikan sebagai kepala wilayah karena jasa mereka kepada pemerintah kolonial. Namun, dalam mengelola distrik sewaan, keduanya memiliki kecenderungan yang sama; memerintah dengan perilaku feodal.

Kata kunci: Cina, penguasa, pemerintah, tuan tanah, kolonial.

Abstract

The Chinese was considered the foreign people in Besuki Residency, despite of they had settled in Java northeast coast, even some had become administrators in the private land of the area. This article identifies and describes why they were able to be the administrators in the area from the end of 18th to the beginning of 19th century. The problems to discuss are the relationship between Chinese administrators and the indigenous government and their relationship to the people. This study shows that there were differences and similarities between Chinese contract handlers (Chinese landlords) and Chinese as administrators. They were differentiated by the way of earning wide land and the way of getting power. The landlords had the right to manage wide land by renting or buying from the colonial government. Meanwhile, Chinese administrators were promoted as the head of area because their merit for colonial government. However, in managing the rented district both of them had similiar tendency; governing by feudal manner from which they considered themselves the owners of the land.

Keywords : Chinese, administrator, government, landlord, colonial

A. Pendahuluan

Etnis Cina yang telah menetap lama di Jawa mendiami beberapa kota pelabuhan

penting sepanjang pantai utara Jawa mulai Batavia, Banten, Cirebon, Semarang, Gresik, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo,

dan Besuki (Ujung Timur Jawa) (de Jong, 1870:214). Di wilayah Ujung Timur Jawa ini orang-orang Cina tidak hanya beraktivitas dalam bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga bidang politik dan pemerintahan. Mereka ikut ambil bagian dalam pengembangan wilayah Ujung Timur Jawa sebagai penguasa. Orang-orang Cina terkadang menempati kedudukan-kedudukan yang mempunyai tanggung jawab besar di dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan Jawa, sehingga membentuk perhubungan-perhubungan dengan puncak tertinggi kaum ningrat penduduk asli. Kasus keluarga Jayaningrat di Pekalongan pada pertengahan pertama abad kedelapan belas bisa dijadikan acuan. Sultan Agung juga telah mengangkat seorang pedagang Cina sekaligus seorang *abdi dalem* di Lasem bernama Cik Go Ing untuk menggantikan kedudukan majikannya, Bupati Lasem Singawijaya (Cina-Jawa). Hal ini dilakukan sebagai hadiah atas jasa-jasanya selama peperangan yang dilakukan Mataram terhadap Surabaya (1620-1625). Oleh karena itu, ia diberi gelar Jawa, yaitu Tumenggung Mertaguna. Bupati-bupati Lasem yang berikutnya serta daerah-daerah pantai utara yang berdekatan, seperti Tuban, Kudus, Blora, dan Bojanegara (Rajegwesi), juga berasal dari keturunannya. Mereka belakangan ini terikat persekutuan, melalui perkawinan dengan keluarga-keluarga Cina peranakan dari daerah pesisir, di samping perkawinan-perkawinan yang mereka lakukan dengan keluarga-keluarga istana para pangeran Jawa (Pigeud, 1932:124).

Fenomena tersebut ternyata tidak hanya terjadi di keraton Mataram, tetapi juga terjadi di wilayah Ujung Timur Jawa, yaitu di Kabupaten Besuki dan Kabupaten Probolinggo. Di dua daerah ini orang-orang Cina keturunan tidak hanya bertindak sebagai penguasa tanah partikelir, tetapi juga sebagai penguasa daerah dan berperilaku layaknya para penguasa Jawa. Misalnya, bupati Cina di Kabupaten Besuki bernama Han Mi Joen yang kemudian bergelar Kyai Tumenggung Suroadiwikrama. Di Kabupaten Probolinggo, Han Kit Ko juga berpangkat tumenggung dan terkenal

dengan panggilan Cina Tumenggung. Sebenarnya masih banyak contoh tentang orang-orang Cina yang berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan. Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan mengapa orang-orang Cina berhasil menjadi penguasa di tanah-tanah partikelir di wilayah Ujung Timur Jawa pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19 dan berperan besar dalam ranah pemerintahan.

B. Cina, Tanah, dan Kuasa: Kerangka Teoretis dan Metode Analisis

Seperti ditunjukkan Bloch (1976:281), penguasaan atas sebidang tanah berarti juga menguasai segala isinya, termasuk penduduk yang tinggal di atas tanahnya. Di sini berlangsung proses menguasai dan dikuasai, proses penghambaan dan pengabdian yang sangat intensif. Penguasaan tanah sebagai unit sosial khas terdapat dalam kehidupan agraris pada Abad Pertengahan. Dalam hal ini terdapat hubungan penguasa tanah dan petani penggarap. Pola hubungan itu di Asia Tenggara termasuk di Indonesia oleh Geertz (1963) dikatakan telah menunjukkan kecenderungan eksploitatif; salah satu ciri utama dari pemerintah kolonial. Inti dari pengertian eksploitasi adalah terdapat sementara individu, kelompok, atau kelas yang secara tidak adil atau secara tidak wajar mengambil keuntungan atas kerja atau hasil atas kerugian pihak lain (Lorwin, 1931:141). Hubungan eksploitatif yang berlangsung di tanah partikelir memengaruhi lembaga tradisional yang disebut ikatan feodal.

Sekalipun ikatan feodal awalnya didasarkan pada kedudukan sosial antara kepala dan rakyat, tidak menutup kemungkinan terjadi pemindahan kekuasaan feodal atas penduduk dengan jalan kontrak sebagaimana kajian Burger (1977:93-97). Penjualan tanah oleh Pemerintah Daendels kepada orang Cina menimbulkan hubungan kontrak di antara kedua pihak tersebut. Akan tetapi, hubungan antara orang Cina (penguasa tanah) dengan penduduk di atas tanah yang dibeli tetap merupakan hubungan feodal. Perubahan

dalam hubungan sosial di pedesaan tidak lagi bersifat paternalistik yang memberi perlindungan kepada kliennya. Di atas segala-galanya, kekuatan historis yang besar telah melewati batas-batas subsistensi dan hubungan sosial yang tradisional serta menggantinya dengan bentuk kontrak. Pengaruhnya seperti dikemukakan oleh Wolf (1983, 1971:50-66) adalah merampas dari petani konteks kelembagaan tradisional, sehingga mendorong tumbuhnya ketegangan yang dapat menuju pemberontakan.

Dalam sistem pemerintahan tradisional berlaku sistem birokrasi tradisional. Birokrasi tradisional ini hidup dalam suasana feodalisme. Dalam suasana feodal ini berlaku orientasi *ascriptive* yang mendambakan faktor keturunan sebagai sentral aktivitas bagi dunianya. Hanya keturunan dari satu trah saja yang berhak mendapatkan kedudukan dan peranan dalam kerajaan, karena trah mereka dianggap sebagai kelompok terpilih di antara trah yang lain. Mereka lebih mengutamakan keberlangsungan genealoginya, yaitu kemurnian keturunan dibandingkan kemampuan menjalankan tugas (Suhartono, 2001:57).

Dalam sistem feodal ada ketentuan bahwa putera bupati yang diangkat menjadi bupati diprioritaskan anak laki-laki keturunan dari *garwa padmi* (istri resmi). Apabila syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, ada pertimbangan lain (Tjokrowinoto, 1952:34). Penunjukan calon pengganti bupati dapat juga dilakukan atas permintaan atau saran dari bupati yang akan digantikan sewaktu masih hidup. Penunjukan calon pengganti, anak atau mungkin saudara itu dilaporkan kepada pemerintah pusat kerajaan, tetapi pada masa kolonial hal tersebut dilaporkan kepada VOC, pemerintah Inggris, atau kemudian pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Selama calon tersebut tidak menentang pemerintah pusat, pengusulan itu pada umumnya disetujui. Namun demikian, ada kalanya terjadi bahwa pemerintah menghendaki calon yang lain (Tjiptoatmodjo, 1983:344-345). Akan tetapi, pada akhir abad XVIII terjadi

penyimpangan dari tradisi yang sudah berlaku, karena pada saat itu orang-orang Cina keturunan berhasil menduduki jabatan puncak di Karesidenan Besuki, yaitu di Besuki dan Probolinggo. Mengapa bisa terjadi penyimpangan? Apakah ada sumber kekuasaan lain yang bisa mengantarkan etnis Cina keturunan menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintahan tersebut?

Menurut Nagtegaal (1994:78-79), pemisahan antara politik, militer, ekonomi, dan jenis kekuasaan lain hanya cocok untuk realitas dalam masyarakat modern yang kompleks. Di kerajaan-kerajaan Jawa pada abad XVII dan XVIII, tidak dijumpai pemisahan antara elit politik dan elit ekonomi, hierarki sosial paling atas memegang kekuasaan hampir semua aspek kehidupan. Pada kenyataannya, kekuasaan politik dan ekonomi mereka benar-benar ada, melembaga, dan tidak ada istilah elit ekonomi atau borjuis, sesuai dengan dasar tingkatan yang spesial dalam masyarakat Jawa. Elit politik adalah juga elit ekonomi. Oleh karenanya, peneliti modern memandang bahwa kebanyakan bupati Jawa memiliki komponen kekuasaan ekonomi. Dengan demikian, kekayaan ekonomi mempunyai akses yang besar dalam memperoleh kekuasaan. Beberapa bupati kaya dapat mendominasi sumber-sumber kekuasaan politik. Mereka memiliki posisi penting dalam negara yang sebagian besar diperoleh karena kekayaan mereka yang melimpah. Mereka bisa disebut *political entrepreneurs*. Perlu diingat bahwa ini bukan ciri khas semua bupati Jawa, sebab banyak dari mereka yang memiliki sumber-sumber kekuasaan yang lain. Hal ini bukan berarti kekayaan tidak penting bagi mereka. Untuk jelasnya tidak ada keseragaman model bagi bupati Jawa. *Political entrepreneurs* hanya salah satu kategori (Nagtegaal, 1994:79-80). Melalui kekayaan, jabatan-jabatan politik dapat diperoleh. Pada umumnya jalan ini yang mengantarkan orang-orang Cina menduduki jabatan-jabatan politik di dalam lingkungan kekuasaan orang-orang pribumi.

Untuk mengetahui bagaimana proses orang-orang Cina di Ujung Timur Jawa bisa

menjadi tuan tanah dan penguasa politik akhir abad XVIII hingga awal abad XIX, penelitian yang menjadi basis tulisan ini menempatkan wilayah Ujung Timur Jawa –yang di kemudian hari menjadi Karesidenan Besuki– sebagai objek kajian dengan menggunakan metode sejarah. Wilayah yang dimaksud adalah Besuki, Panarukan, dan Probolinggo dengan pertimbangan di daerah-daerah itulah orang-orang Cina berhasil menduduki jabatan puncak dalam birokrasi pemerintahan pribumi.

Prosedur dalam metode sejarah meliputi empat tahap, yaitu (1) heuristik (pengumpulan sumber); (2) verifikasi (kritik); (3) interpretasi: analisis dan sintesis; dan, (4) penulisan hasil penelitian (historiografi). Adapun data-data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Sumber-sumber primer yang digunakan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, *Kolonial Verslaag*, *Regeering Almanak*, *Indisch Plakaatboek*, *Staatsblad*, *Daagregister*, dan autobiografi. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari Arsip Nasional Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan Sanata Dharma, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Hatta Corner, dan Perpustakaan Sono Budoyo. Sumber sekunder berupa karya cetak dan telah dipublikasikan, baik karya penulis asing maupun dalam negeri yang banyak jumlahnya, yang menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat erat hubungannya dengan tema yang dipilih. Tahap verifikasi meliputi dua kegiatan yang dilakukan, yaitu meneliti autentisitas atau keaslian sumber dan kredibilitasnya. Ketiga, interpretasi atau penafsiran sumber sejarah, meliputi dua kegiatan, yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah mencari fakta-fakta sejarah, sedang sintesis berarti menyatukan fakta-fakta yang telah diperoleh. Tahap terakhir, yaitu historiografi (penulisan laporan penelitian sejarah). Artikel ini memperhatikan aspek kronologis dan diakronis dalam peristiwa sejarah, sehingga diperoleh tulisan berbasis penelitian yang bersifat deskriptif-analitis.

C. Ujung Timur Jawa dan Penataan Administrasinya

Ujung Timur Jawa adalah kawasan timur dari Jawa Timur. Istilah ini muncul pertama kali di masa VOC khususnya dalam surat (*missive*) Spelman tahun 1677 dan Camphuys tahun 1687. Istilah itu juga dipakai oleh Gubernur Jawa Timur Laut pada surat 26 Oktober 1761 (*Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, 1919:40). Ujung Timur Jawa ini memiliki akses ke arah laut di tiga tempat. Ke arah utara Selat Madura, ke arah timur Selat Bali, ke arah selatan Samudra Hindia, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Karesidenan Pasuruan. Bersama-sama dengan Karesidenan Pasuruan, daerah Ujung Timur Jawa pada masa pemerintahan raja-raja Blambangan menjadi incaran para penguasa baik dari Jawa Tengah maupun dari Bali. Wilayah ini juga disebut *Oosthoek* selama periode Kolonial Belanda (Gonggrijp, 1934:1047).

Sejak runtuhnya kerajaan Majapahit, wilayah Ujung Timur Jawa yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Blambangan, menjadi incaran kerajaan Islam Demak. Seperti halnya Majapahit, Demak juga bermaksud meluaskan wilayahnya dan menempatkan wilayah ujung timur ini di bawah kekuasaannya. Demak mengirim ekspedisi ke Blambangan tahun 1546 (de Graaf dan Pigeaud, 1985:234-236). Ekspedisi Sultan Demak Bintoro ke Blambangan di Ujung Timur Jawa bekerjasama dengan Pasuruan berhasil mengepung Panarukan. Blambangan jatuh 1546. Prajurit Demak dan Pasuruan pada waktu itu memang telah berhasil menduduki sebagian besar Ujung Timur Jawa. Dengan demikian, Demak berhasil menanamkan kekuasaan untuk waktu yang lama, tetapi ketika memimpin ekspedisi ke Panarukan ini Sultan Trenggono meninggal dunia, akibatnya kerajaan-kerajaan di Ujung Timur Jawa selama lebih dari tiga perempat abad bebas dari ancaman kerajaan-kerajaan Islam dari sebelah barat. Hal ini disebabkan Sultan Pajang yang meneruskan pemerintahan Sultan Trenggono tidak bernafsu untuk meluaskan wilayah jajahan seperti pendahulunya.

Pada masa pemerintahannya di Mataram (1575-1601), Panembahan Senopati berambisi menguasai Ujung Timur Jawa. Dalam serangan yang dilakukan, Panembahan Senopati sebenarnya berhasil menaklukkan Blambangan, tetapi Blambangan tetap diberi kebebasan dalam berbagai hal. Karena Blambangan terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan Adipati Kaninten, Bupati Pasuruan, Mataram menarik simpatinya kepada Blambangan. Peperangan tidak terhindarkan. Ketika Mataram berhasil mengurangi pertahanan Blambangan, Raja Blambangan (pengganti Sontoguno, tidak diketahui namanya) bersama keluarga dan beberapa pejabat, serta sepasukan prajurit terpaksa menyingkir ke Bali untuk mengatur siasat (Oetomo, 1987:28). Cucu Panembahan Senopati, Sultan Agung (1613-1645) juga mengirimkan ekspedisi ke Blambangan. Ekspedisi tersebut dilakukan sampai empat kali, yaitu pada tahun 1625, 1636, 1639, dan 1645. Usaha ini tidak sepenuhnya berhasil, tetapi beberapa wilayah telah dikuasai oleh Sultan Agung (Oetomo, 1987:29). Dalam struktur wilayah kerajaan Mataram, beberapa wilayah yang berhasil dikuasai oleh Sultan Agung di daerah Ujung Timur Jawa ini dimasukkan wilayah *Pesisir Wetan* (pesisir timur). Karena termasuk dalam daftar wilayah yang tunduk kepada kerajaan Mataram, Blambangan diwajibkan menghadap pada waktu yang telah ditentukan, membayar upeti dan melakukan kerja wajib untuk Mataram. Beberapa wilayah Blambangan yang telah dikuasai Mataram antara lain Probolinggo (1000), Pokang (2000), Lumajang (7000), Puger (2000), Gembong (1000), Blambangan (2000), Banyuwangi (1500) (*Babad Momana*, Yogyakarta, S.E. PBE 100:173). Namun demikian, belum ditemukan sumber untuk mengetahui apakah raja-raja Blambangan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Mataram. Kemungkinan besar motivasi Sultan Agung melakukan serangan ke Blambangan berulang kali disebabkan pihak Blambangan tidak mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai kerajaan taklukan. Demikian juga serangan

yang dilakukan oleh Amangkurat I, raja Mataram berikutnya disebabkan raja-raja Blambangan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan upeti dan mengirimkan tenaga kerja ke Kerajaan Mataram.

Amangkurat I mengirim ekspedisi pertama tahun 1646 di bawah pimpinan Pangeran Selarong dan Padurekso. Mataram berhasil mengalahkan Blambangan dan pada waktu itu sekitar 5.000 orang Blambangan diangkut ke Mataram. Pada tahun 1647, ekspedisi Mataram di bawah Tumenggung Wiraguna menyerang Blambangan lagi dan merencanakan mengangkut 1.500 orang Blambangan ke Mataram (Suprpto, 1984:65). Rencana Mataram yang terakhir ini gagal setelah Tumenggung Wiraguna meninggal dunia (de Graaf dan Pigeaud, 1985:234-236). Namun demikian, wilayah-wilayah Ujung Timur Jawa tetap dianggap oleh Mataram sebagai daerah taklukannya. Hal ini dapat dilacak dalam catatan Rouffaer yang mengemukakan bahwa pada rentang waktu terakhir penyusunan *Serat Pustaka Raja Puwara* tahun 1744, nama-nama daerah di Ujung Timur Jawa beserta dengan luas daerahnya masih disebutkan di dalamnya. Daerah-daerah tersebut adalah Dringu, Besuki, Blambangan, Banyuwangi (10.080), dan Madura (18.000) (Rouffaer, tt:285).

Pada tahun 1743, karena daerah Ujung Timur Jawa merupakan wilayah Blambangan dan Blambangan sendiri adalah vazal Mataram, VOC merasa berhak untuk mengambil alih daerah ini dengan berpedoman pada kontrak antara Gubernur Jendral van Imhoff dengan Susuhunan Pakubuwana II (Nawiyanto, 2007:40). Namun demikian, VOC tidak bisa secara otomatis menguasai wilayah Blambangan karena para penguasa daerah yang bernaung di bawah kerajaan Blambangan tidak menyerah begitu saja. Baru setelah melalui serangkaian peperangan VOC dapat menguasai Ujung Timur Jawa.

Sebelum pembentukan distrik-distrik baru oleh VOC, di Blambangan Barat sudah ada unit-unit pemerintahan lokal, yang sebelumnya tunduk di bawah kekuasaan Raja Blambangan. Unit-unit pemerintahan lokal tersebut terletak di bagian utara dari

wilayah Blambangan, yakni Panarukan dengan Demang Tisman yang diangkat VOC pada tahun 1743 sebagai penguasa wilayah Panarukan. Pada tahun 1768 ia diberhentikan dan diangkat seorang patih keturunan Bupati Lasem Purbonegoro yang bernama Patih Mertoyudo (Mashoed, 2004:52). Di bagian Selatan adalah Kabupaten Puger. Kabupaten Puger dihapus pada tahun 1757. Penghapusan Kabupaten Puger ini setelah terbunuhnya Ario Wiriodiningrat, seorang pangeran dari Mataram yang memerintah Puger, dan dibunuh karena menentang Blambangan. Setelah Kabupaten Puger dihapus, daerah ini diperintah oleh para bekel yang langsung berada di bawah kekuasaan Blambangan. Bekas Kabupaten Puger ini dibagi menjadi empat kabekelan yang masing-masing ditempatkan di Puger, Jember, Sentong, dan Prajekan. VOC pada saat itu belum bisa menguasai daerah ini (Hageman, 1860:265)

Setelah berhasil menundukkan para bekel di Blambangan Barat ini, VOC kemudian membentuk distrik baru yang pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan wilayah kabekelan sebelumnya, yaitu Jember, Prajekan, Sentong, dan Sabrang atau Renes. Di distrik-distrik baru ini diangkat kepala daerah yang diberi gelar mantri. Pada tahun 1774, mantri-mantri baru telah dipilih. Sadita dipercaya untuk memerintah Jember, Unan memerintah distrik Prajekan, Sutatering memerintah di Sentong (sekarang: Bondowoso), dan Roman memerintah di Sabrang atau Renes (Margana, 2007:162). Selain itu, masih ada distrik-distrik lain di Blambangan Barat, yaitu distrik Puger, Plindo, Batu Ulu, Dempok, dan Gitem, tetapi pada tahun 1774, distrik-distrik tersebut kecuali Puger, dimasukkan ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Lumajang dan Pulau Nusabarong diletakkan di bawah pengawasan Tumenggung Joyolelono, Bupati Banger. Selanjutnya di Puger diangkat seorang bupati dengan gelar tumenggung. Bupati pertama Puger tersebut adalah Raden Tumenggung Prawiradiningrat, anak laki-laki bupati Pasuruan, Nitidiningrat. Bupati ini diharuskan

mengirimkan pajak dari Puger kepada VOC di Desa Puger, Bangle, atau Cireme (Margana, 2007:163).

D. Tuan Tanah Cina, Bupati Cina, dan Perlawanan Rakyat (Peristiwa 13 Mei 1813 di Probolinggo)

Di samping daerah-daerah yang sudah tercakup dalam wilayah Kabupaten Puger, masih ada daerah-daerah lain, yaitu Besuki yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Tumenggung Joyolelono, Bupati Banger (Probolinggo), dan Panarukan yang ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Panembahan Sumolo Natakusuma, Sultan Sumenep. Besuki semula merupakan sebuah desa bernama Desa Demung Maduran. Di dalam memori kolektif masyarakat lokal, Besuki pertama kali dibuka oleh Wirabrata yang berasal dari Pamekasan. Karena jasanya mengajak migrasi orang-orang Madura ke Besuki dan membuka tanah Besuki, Wirabrata oleh Bupati Joyolelono diangkat menjadi Demang Besuki. Pada tahun 1764, Wirabrata digantikan oleh anaknya yang bernama Bagus Kasim. Pada masa pemerintahan Bagus Kasim ini Kademangan Besuki dinaikkan statusnya oleh Bupati Banger menjadi kepatihan dan Bagus Kasim diangkat sebagai patih. Bagus Kasim kemudian menggunakan nama Abiseka Wiradipura (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:11). Meskipun ayah Patih Wiradipura diyakini sebagai pembuka daerah Besuki, tetapi yang diangkat sebagai Ronggo Besuki bukan keluarganya, tetapi anak Suopernala, seorang Cina penguasa di Panarukan.

Han Tjin Kong atau Suopernala diangkat menjadi kepala distrik di Panarukan dan dihadiahi gelar Ngabehi pada tahun 1768. Hal ini dilakukan sebagai balas jasa karena selama terjadi peperangan antara Blambangan dengan VOC, Suopernala memainkan peranan sangat penting sebagai informan VOC. Pada tahun 1772, anak laki-lakinya, Han Sam Kong, secara populer dipanggil Baba Sam, dilantik juga sebagai Ronggo Besuki dengan nama Sumadiwirya. Ia memerintah Besuki hingga 1776 dan digantikan oleh adiknya, bernama Han

Mie Joen alias Baba Midun, yang juga dikenal dengan nama Sura Adiwikrama (Sutherland, 1975:75)

Pada tahun 1779, untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah Belanda di Surabaya memutuskan menyewakan sebagian wilayah Besuki kepada Kapten Cina Surabaya Han Bwee Kong (Kan Boeijko). Pada tahun 1784, Panarukan juga disewakan kepada orang yang sama. Besuki disewa 1.250 Rds per tahun, plus 10 koyang beras, sedangkan Panarukan 625 Rds per tahun. Bahkan, ia memperluas tanah sewanya. Ia menyewa lagi dua distrik lain yang tercakup dalam wilayah pemerintahan Besuki, yaitu Paiton dan Pajarakan, yang terletak di sebelah Barat Besuki dan sebelah timur Banger atau Probolinggo. Tanah ini juga disewa seharga 2.000 Rds per tahun (Margana, 2007:215).

Sepeninggal Han Boey Ko, VOC masih meneruskan cara yang dianggap efektif untuk menarik pajak melalui penyewaan tanah. Keturunan Han Boey Ko pun tertarik untuk menyewa tanah di kedua distrik pantai tersebut. Ini terlihat bahwa pada tahun 1781 Han Tjan Pit meneruskan usaha yang telah dirintis ayahnya, Han Boey Ko. Ia diizinkan untuk menyewa tanah perkebunan Besuki dan Panarukan. Harga sewa disepakati sebesar 1.600 Ringgit Spanyol dalam bentuk uang, 10 koyang beras, 3.750 Ringgit Spanyol sebagai ganti nila, serta sejumlah tenaga, perahu, dan bambu (Wijayanti, 2001:49). Dua distrik di bawah penyewa Cina dari Surabaya ini diperlakukan secara feodal, yaitu penyewa tanah sering bertindak mirip dengan penguasa daerah. Jadi sulit untuk membedakan antara seorang bupati Cina dan seorang penyewa keturunan Cina. Satu-satunya perbedaan bagi VOC adalah bahwa penyewa tanah harus membayar sekaligus sewa tanahnya, sedangkan bupati wajib menyetorkan pajak yang sudah ditentukan jumlahnya serta sumbangan paksa dan sumbangan wajib (Boomgaard, 2004:38-39).

Pada tahun 1795 Bupati Puger Raden Tumenggung Prawirodiningrat wafat. VOC mengangkat Ronggo Besuki, Kyai Ronggo Suro Adiwikrama, sebagai Bupati

Puger dengan gelar Kyai Tumenggung Sura Adiwikrama (Mashoed, 2001:60), dengan syarat-syarat yang sama dalam hal penyerahan hasil bumi kepada Kompeni seperti pendahulunya. Pada masa pemerintahan bupati inilah ibukota Kabupaten Puger dipindahkan ke Bondowoso (Wijayanti, 2001:56). Pada tahun 1798, Distrik Besuki dipersatukan secara administratif dengan Distrik Bondowoso dan Kabupaten Puger (Boomgaard, 2004:38-39). Hawa Bondowoso tampaknya tidak cocok bagi Kyai Tumenggung Suro Adiwikromo, sehingga ia sering sakit. Tahun 1798 ia pindah ke Besuki dan menyerahkan pengawasan tidak langsung atas daerah itu kepada Mantri Wedana Kertonegoro, Wedono Tirtowongso, dan Rekso Negoro. Pada tahun 1801 Bupati Puger, Kyai Tumenggung Suro Adiwikrama wafat. Menantunya, Prawiro Adiwijoyo yang pada saat itu menjadi Ronggo Besuki menggantikannya sebagai Bupati Puger pada tahun 1802 dengan gelar Kyai Tumenggung Surio Adiningrat dan bertempat tinggal di Bondowoso. Pada tahun 1806 Pusat pemerintahan dipindah lagi dari Puger ke Besuki (Wijayanti, 2001:118-119).

Pada tahun 1795 hak *oktroi* (izin) dari VOC dicabut dan pada tahun 1799 dibubarkan. Sejak saat itu pemerintahan di Jawa berpindah dari VOC kepada Pemerintah Belanda. Pada waktu Belanda di bawah pemerintahan Kekaisaran Napoleon, Daendels mendapat mandat untuk memerintah Jawa, dengan pangkat Gubernur Jenderal. Ia mengambil tindakan-tindakan yang tegas dan keras, terutama di bidang administrasi pemerintahan (Burger, 1962:125). Pada masa pemerintahannya karena sangat kekurangan uang tunai, Daendels (1810) mengambil keputusan untuk memakai tanah-tanah yang sudah disewakan sebelumnya oleh VOC itu sebagai jaminan untuk memperoleh uang. Diserahkannya untuk seterusnya hak milik atas tanah-tanah di Besuki dan Panarukan kepada Han Tjan Pit. Ia juga menjual tanah-tanah yang lain kepada saudara-saudara Han Tjan Pit, yaitu Han Kit Ko (sumber lain menyebut Han Ti Ko) yang kira-kira

sama luasnya dengan daerah Besuki dan Panarukan dan terletak di daerah Probolinggo (Lombaard, 1996:107).

Besuki dan Panarukan yang sebelumnya disewakan oleh Daendels dijual kepada Han Tjan Pit 30 Juni 1810 seharga 400.000 dolar Spanyol. Nilai ini seperempat lebih banyak dari penafsiran Komite yang dibentuk oleh Pemerintah Daendels. Sebelum Besuki dan Panarukan dijual, beberapa orang atas nama pemerintah telah meminjam uang kepada Han Tjan Pit. Sisa pinjaman sebesar 216.337 Rixdollar atau 157.336. Sisa pinjaman yang belum dibayarkan kepada Han Tjan Pit digunakan sebagai pembayaran pada saat pembelian tanah Besuki dan Panarukan dari Pemerintah. Kekurangannya dilakukan dengan mengeluarkan surat pinjaman melalui angsuran atau bunga (Bastin, 1953:432). Dengan dibelinya kedua daerah ini, Han Tjan Pit kemudian menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja wajib. Penduduk diminta sumbangan tenaga untuk memelihara jalan-jalan dan mengangkut barang-barang pemerintah ketika melewati daerah ini. Sejak Han Tjan Pit menjadi pemilik tanah Besuki dan Panarukan ia diberi pangkat mayor oleh pemerintah (*Rapport van Landschappen*).

Para pemimpin utama yang diangkat oleh pemilik tanah untuk memerintah daerah-daerah itu adalah orang-orang Cina, di antaranya terdapat beberapa Cina Peranakan. Satu di Distrik Besuki, diangkat sebagai ronggo bernama Bapa Panderman bergelar Tumenggung Surio Adiningrat (Hageman, 1860:263). Di Panarukan diberi gelar Ronggo Djojo Wikromo (ANRI, A.D. Besuki, Kode Inv, 23/24 No. bundel 10/2). Kedua orang ini tunduk kepada tokoh Cina utama ini. Han Tjan Pit juga memiliki tenaga Eropa, tetapi jumlahnya hanya satu atau dua orang dan mereka bekerja sebagai juru tulis, sedangkan semua jabatan kepala rendahan diberikan kepada orang pribumi.

Di Distrik Besuki dan Panarukan ini, Han Tjan Pit mengembangkan pertanian dan perdagangan dengan baik. Kemakmuran dan ketenteraman di daerah ini menyebabkan orang-orang dari daerah lain pindah ke Be-

suki. Ia kemudian bersama para wakilnya dalam beberapa tahun mengembangkan sebuah daerah pertanian yang penduduknya kira-kira 80.000 orang. Kesaksian orang-orang Eropa, pada umumnya, sepakat bahwa daerah itu dikembangkan dengan istimewa sehingga menjadi lahan produktif, sumber kesejahteraan, dan kemakmuran, tulis Kolonel Mackenzie pada tahun 1812. Hopkins pada tahun 1813 menilai mutu pengairan dan perbaikan model irigasi telah dikenalkan di berbagai tempat untuk meningkatkan produksi beras dan sayur-sayuran. Penjualan melon saja pada suatu saat mencapai 4.000 piaster, sedangkan uang sewa tanah tahunan kepada Kompeni hanya sebanyak 1.000 piaster (Lombaard, 1996:81).

Tertarik oleh keuntungan keuangan yang mengalir pada pemerintah dari hasil penjualan tanah Besuki dan Panarukan, Daendels bermaksud melepaskan tanah-tanah di sebelah timur Surabaya kepada orang-orang Cina. Perhatiannya ditujukan pada Kabupaten Probolinggo, karena hasil tahunannya hanya senilai 2.000 ringgit Spanyol, 70 3/4 kolang beras, dan 140 dollar Spanyol. Yang tidak terlihat oleh Daendels ialah masih terdapatnya tanaman kopi dan kayu jati yang belum diusahakan secara maksimal di daerah ini. Menurut Daendels penghasilan yang diterima pemerintah saat itu tidak seimbang dengan tingkat kesuburan dan luas tanah. Dalam laporan tahun 1811 disebutkan bahwa Probolinggo memiliki luas tanah 10.253 bahu, terdiri atas sawah seluas 4.675 bahu dan 5.578 bahu berupa tegalan, belum terhitung tanah liar atau semak belukar yang belum dikelola secara cermat, maupun tanah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya (Wijayanti, 2001:78). Akhirnya daerah ini dijual oleh Daendels dengan harga yang sulit, satu juta Rixdollar (Boomgaard, 2004:39).

Akibat pembelian tanah Probolinggo tersebut, pada awal tahun 1811 Han Kit Ko telah secara sah memiliki Probolinggo yang ditandai dengan sebuah upacara resmi. Pada kesempatan ini ia menerima gelar Mayor Cina dan tuan tanah Probolinggo. Tampaknya penjualan tanah negara kepada orang Cina di Pasuruan yang bergelar

Kapitan ini, tidak hanya merupakan beralihnya kepemilikan hak atas tanah, tetapi juga warisan kebesaran seorang penguasa tradisional Jawa, berupa titel dan hak-hak istimewa lainnya seperti yang melekat pada bupati pribumi. Dalam hal ini, penduduk Probolinggo menyebut Han Kit Ko dengan panggilan Tumenggung atau Cina Tumenggung. Han Kit Ko menghendaki penghormatan yang sama dari penduduk sebagaimana yang dilakukan penduduk terhadap Bupati Probolinggo, Djodjodiningrat. Karena Kabupaten Probolinggo telah menjadi milik Han Kit Ko, Bupati Probolinggo ini dipindahkan ke Kabupaten Sedayu, dan tuan tanah Cina kemudian menempati dalem Kabupaten Probolinggo (Ong Hokham, 1983:378).

Merasa telah menjadi pemilik mutlak atas tanah dan penghuninya, tindakan yang dilakukan oleh Han Kit Ko dapat sesuka hatinya, seperti memberhentikan atau memindahkan beberapa kepala pribumi, dan memungut pajak sesuai dengan kehendaknya. Dapat dipastikan beberapa wewenang di atas sangat tidak menguntungkan penduduk Probolinggo (Wijayanti, 2001:90). Akibat dari tindakan ini muncul ketidakpuasan rakyat. Ketidakpuasan ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang yang telah tersingkir karena tindakan politisnya untuk mengadakan gerakan perlawanan terhadap Han Kit Ko. Gerakan ini dipimpin oleh Kiai Maas yang oleh P.J.Veth disebut Demang Wonosari dan oleh Van Deventer disebut Demang Tengger Adas. Peristiwa itu terjadi ketika Han Kit Ko sedang bersenang-senang dan beramah tamah dengan beberapa pegawai Inggris. Undangan dalam pesta yang diselenggarakan Han Kit Ko kebanyakan pegawai Eropa dari Pasuruan dan Surabaya, seperti Kolonel Fraser dari Regimen 78 Surabaya dan Letnan Robertson. Tiba-tiba datang berita bahwa telah terjadi pemberontakan yang diperkirakan dipimpin oleh orang yang tidak senang dan dimungkinkan berasal dari keluarga bekas bupati (Sutherland, 1983:147).

Sekitar 30 pal ke arah Barat Laut di ibu kota Probolinggo, di desa Wonosari, ada

kerumunan lain dalam suasana yang berbeda. Satu bulan sebelumnya, desa ini telah dibanjiri penduduk dari sekitar daerah itu. Pada waktu itu didiami oleh orang-orang Tengger (Orang Jawa Hindu dari Pegunungan Tengger), tetapi juga sudah ada sedikit muslim. Di antara kerumunan orang-orang tersebut, terdapat seorang pemuda muslim dari masjid Kyai Ampel Surabaya. Masyarakat memanggilnya Kyai Mas. Ia mengadakan kunjungan melalui Pasuruan, Probolinggo, Panarukan, Besuki, dan akhirnya mendapat persinggahan di desa ini. Ia memproklamkan dirinya menguasai dan menyebarkan agama Islam ke seluruh distrik di ujung timur, menghapus pajak, dan mengusir orang-orang Cina dan Eropa keluar dari wilayah ini. Seorang kepala daerah lokal, bernama Demang Muneng dan penduduk dari Desa Kedampo, Pohsangit, dan Ketapang yang pertama maju ke depan dan memberi kesetiaan mereka pada proklamasi "juru selamat" ini. Dalam waktu yang tidak lama ribuan penduduk bergabung pada gerakan baru tersebut (Margana, 2007:220-222). Sebelum kegemparan pertama dari gerakan Kyai Mas, masyarakat Probolinggo telah diguncang oleh perlambang dan secara mental disiapkan oleh ramalan dalam bentuk sebuah kematian kerbau dan seorang gelandangan. Akhirnya, masyarakat lokal menyatakan bahwa gangguan diinisiatifi oleh Bupati Probolinggo sebelumnya, Jayadiningrat. Kematian kerbau ditafsirkan sebagai hilangnya kekuasaan bupati Jawa yang telah dipaksa keluar dari wilayahnya oleh Cina tuan tanah (Margana, 2007:222).

Akhirnya Desa Moeneng yang digunakan sebagai tempat pertemuan penduduk yang akan mengadakan gerakan perlawanan. Desa ini terletak pada km 9 di barat daya Probolinggo ke arah Sukapura. Lebih kurang 2.300 orang berkumpul di bawah perintah Demang Tengger Adas dan Demang Moeneng. Pada sore hari tanggal 18 Mei 1813, Fraser, Mc Pherson, Robertson Cameron, Felix Dupre, Han Kit Ko, dan Ong Tjong-Tjong menuju distrik Moeneng. Mereka merasa bahwa kasus itu merupakan ungkapan semangat agama, sehingga bertekad memeriksa secara pribadi dan mengetahui maksud pemberontak. Para

pemberontak tidak mau diajak kompromi dan malah menyerang dengan kekerasan. Dalam peristiwa Moeneng, Frasser, Mc Pherson, Felix Dupre, Han Kit Ko, dan Ong Tiong-Tiong terbunuh oleh serangan agresif kaum pemberontak (Lekkerkerker, 1931:502). Hanya Robertson Cameron yang masih bisa menyelamatkan diri dan berusaha kembali ke dalam kabupaten. Dalam situasi sulit, opsir itu tetap bertahan di dalam kabupaten. Pada malam itu juga beberapa budak diperintahkan ke luar untuk mengumpulkan orang-orang Han Kit Ko. Menjelang pagi tanggal 19 Mei 1813 berhasil dikumpulkan sekitar 150 orang. Kekuatan ini dibagi dua, sebagian berjaga-jaga mempertahankan dalam kabupaten dan sisanya dikirim keluar untuk mencari informasi mengenai situasi pemberontakan. Ternyata orang-orang yang dikirim keluar tidak kembali. Ada dugaan mereka bergabung dengan pihak pemberontak.

Cara yang ditempuh Cameron agar mereka yang di dalam kabupaten tidak ikut menyeberang pada kaum pemberontak adalah menahannya di kompleks kabupaten serta menempatkan budak-budak yang dapat dipercaya di seluruh gerbang dan pintu keluar. Kekuatan yang ada tidak mampu membendung agresivitas pemberontak. Demang Tengger Adas dan Demang Moeneng beserta pengikutnya mengibarkan bendera warna kuning sebagai simbol keberanian. Para pengikutnya mengenakan sepotong kain diikatkan pada seputar leher (ANRI, A.D. Probolinggo, No. bundel 10/2, No. 155). Pertahanan yang lemah memudahkan pemberontak merampok dan membakar harta benda milik Han Kit Ko. Dalam gerakan ini Demang Tengger Adas berhasil mengambil alih balai Probolinggo dan mengangkat dirinya sebagai pangeran di istana Kabupaten Probolinggo.

Seperti halnya gerakan sosial di pedesaan Jawa lainnya, gerakan petani ini dengan mudah dapat diatasi oleh kekuatan militer Inggris. Gerakan protes yang berakhir pada perlawanan dari pihak penguasa, tidak lain karena secara langsung terancam otoritasnya (Kartodirdjo, 1990:154-155). Penguasaan oleh penduduk pribumi di Probolinggo tidak bertahan

lama (Kartodirdjo, 1977:44). Para kurir dikirim ke Surabaya dan Pasuruan untuk minta bantuan. Residen Inggris di Pasuruan, H.G. Yourdan memerintahkan orang-orang Belanda dipimpin Kolonel Arendchild dan pasukan Jayen Sekar di bawah pimpinan Letnan Droeyer ke Probolinggo. Pada sore hari tanggal 19 Mei 1813, pasukan ini membentuk pertahanan di Tongas. Di tempat ini Komandan Surabaya, Mayor Forbes beserta 300 orang tentara Skotlandia dan 500 serdadu Benggala dari Resimen ke-78 bergabung dengan pasukan Pasuruan. Menjelang fajar tanggal 20 Mei 1813 pasukan gabungan ini menghadapi para pemberontak. Pada jarak 3 paal dari Tongas pasukan gabungan dihadang kaum pemberontak yang membawa bendera kuning. Gerakan ini dipimpin sendiri oleh Demang Tengger Adas. Para pemberontak menghadapi musuh secara frontal, karena semangat yang berkobar-kobar yang dipompakan oleh Demang Tengger Adas. Mereka mendesak ke tengah-tengah barisan pasukan gabungan yang dilengkapi senjata lebih modern. Demang Tengger Adas terluka parah dan ditinggalkan oleh pengikutnya. Demang Tengger Adas ditangkap dan Demang Moeneng terbunuh. Sekitar pukul 12.00, balai Probolinggo dapat diambil alih oleh pasukan Inggris yang sebelumnya telah dirampok harta bendanya.

E. Pembelian Kembali Tanah Besuki, Panarukan, dan Probolinggo

Penyelidikan yang dilakukan Komisaris Crawford dalam menelusuri sebab-sebab pemberontakan memberikan hasil kurang menguntungkan bagi metode penguasaan dan pengaturan oleh tuan tanah Cina (Lekkerkerker, 1931:504). Perkembangan di wilayah ini diawali ketika pemerintah menerima petisi dari Han Tjan Pit, Tuan Tanah Cina di Besuki dan Panarukan pada tanggal 24 Mei 1813 (Bastin, 1954:139). Dalam petisinya dinyatakan bahwa dia tidak lagi dapat memenuhi angsuran untuk pembelian tanah perkebunannya. Han Tjan Pit minta agar tanah itu diambil alih

oleh pemerintah. Tawaran ini diterima oleh Raffles dan sebagai realisasinya tanggal 13 Juni 1813 dikeluarkan perintah kepada Crawford untuk menyusun kontrak pembelian kembali seluruh perkebunan Cina di Karesidenan Besuki. Dua bulan berikutnya Hopkins ditugasi melaksanakan kontrak yang dibuat oleh Crawford dengan Han Tjan Pit. Dalam suratnya Han Tjan Pit minta agar pemerintah tidak merugikan dirinya terkait pengembalian tanah perkebunan. Sesuai kontrak yang disepakati kedua pihak, pemerintah bersedia membayar 400.000 Ringgit Perak (jumlah pembelian asli) dalam empat angsuran (ANRI A.D. Besuki, Kode Inv. 23/24, No. bundel 10/2).

Penundaan sarana pembayaran dilakukan karena pemerintah menghindari pengeluaran uang tunai yang disebabkan kelangkaan uang logam di pasaran (ANRI, A. D. Besuki, Kode Inv. 23/24, No. bundel 10/2). Apabila dilakukan pembayaran tunai menggunakan uang kertas justru akan menambah kesulitan keuangan yang pada masa itu kacau. Pertimbangan ini dijadikan dasar dalam cara membayar kembali Han Tjan Pit. Pembayaran dilaksanakan melalui saham pemerintah sebesar 100.000 Ringgit Perak dengan tingkat suku bunga 6% setahun dan dibayarkan selama empat tahun. Angsuran pertama dimulai 15 September 1814, angsuran ke dua 15 September 1815, angsuran ketiga 15 September 1816, dan angsuran keempat 15 September 1817. Pemerintah juga harus melunasi 3 pos lain kepada bekas penguasa tanah Besuki dan Panarukan. Pertama, sebesar 8.000 Ringgit Perak sebagai ganti pengeluaran yang dilakukan Han Tjan Pit untuk membangun kantor dan rumah dinas di Besuki. Kedua, sebesar 7.000 Ringgit Perak untuk biaya pembuatan benteng di Panarukan. Ketiga, membayar bunga dari 400.000 Ringgit Perak selama 2 bulan 20 hari, terhitung sejak 25 Juni hingga 15 September 1813 sejumlah 5.333,22 Ringgit Perak.

Dalam menyelesaikan masalah Probolinggo Hopkins diberi tugas oleh Raffles untuk membuat kontrak pembelian kembali dengan keluarga bekas Tuan Tanah Probolinggo. Kontrak Probolinggo tampak

secara teknis mengarah pada hipotik untuk ditutup menurut persyaratan kontrak asli. Hal itu terjadi karena angsuran kelima yang seharusnya dibayarkan pada bulan Juni 1813 oleh Han Kit Ko kepada pemerintah tidak dilaksanakan. Penyebabnya adalah terbunuhnya tuan tanah Cina ini 18 Mei 1813. Cara yang dilakukan oleh keluarga Han Kit Ko untuk menghindari beberapa kesulitan, yaitu menyatakan kesanggupannya melepaskan hak atas tanah perkebunan Probolinggo (Lekkerkerker, 1931:505). Kompensasi dari semua itu, mereka mengajukan syarat-syarat. Pertama, minta dibebaskan dari pembayaran angsuran pada masa-masa berikutnya. Kedua, minta diberi ganti rugi uang sehubungan dengan pengambilan tanah oleh pemerintah (ANRI, A. D. Probolinggo, Kode Inv. 23/24. No. bundel 10/1).

Di Probolinggo, almarhum Han Kit Ko meninggalkan banyak hutang. Keluarga yang ditinggalkan ikut memikul beban itu. Sebelum Han Kit Ko menjadi Mayor Cina dan tuan tanah Cina di Probolinggo, saat masih menyandang pangkat Kapitan dan tinggal di Pasuruan, ia telah membuat surat warisan (de Graaf, 1949:377). Surat warisan dalam bahasa Cina diajukan kepada Opsir Militer yang menjadi penguasa Pasuruan, D. Basse (Hageman, 1860). Isi surat warisan di antaranya mengangkat 6 orang anaknya dan kemenakannya Suro Adinegoro menjadi pewaris kekayaannya. Letnan Cina Han Soosik yang tinggal di Surabaya menjadi pelaksana maksud pewarisan itu. Sehubungan dengan kematian Han Kit Ko, surat warisan itu justru secara ekonomis membebani ahli warisnya. Keluarga bekas tuan tanah Cina Probolinggo kehilangan kekayaan yang sangat besar nilainya berupa tanah perkebunan di Probolinggo (Elson, 1984). Dewan lelang di Surabaya telah menerima terjemahan surat warisan dalam bahasa Belanda. Mengingat hutang Han Kit Ko belum dilunasi, kekayaan yang dijual melalui lelang umum tidak diberikan agar bisa membayar seperempat hutangnya. Demikian pula pemerintah juga berusaha memikul sejumlah hutang Han Kit Ko sebagai akibat pengambilalihan perkebunan

Probolinggo (ANRI, A.D. Probolinggo, Kode Inv. 23/24, No. bundel 10/2).

Untuk pembelian kembali perkebunan Probolinggo pemerintah kolonial Inggris harus menyediakan dana sebesar 93.974 dolar Spanyol (Bastin, 1953:438). Dana itu dialokasikan untuk beberapa kepentingan. Pertama, memikul hutang Han Kit Ko seperti jumlah di atas. Kedua, membeli penggilingan gula di Pasuruan yang diperkirakan seharga 20.000 dolar Spanyol ditambah 30 junk tanah sebagai lahan penanamannya untuk penghidupan keluarga bekas tuan tanah ini. Tanah ini disewa oleh Bupati Pasuruan senilai 1.200 dolar Spanyol selama 10 tahun (ANRI, A.D. Probolinggo No. bundel 10/2). Guna memenuhi kepentingan ini, pemerintah Inggris harus menyediakan dana sebesar 12.000 dolar Spanyol. Ketiga, pemerintah menyiapkan pensiun bulanan sebesar 50 dolar Spanyol diberikan kepada 6 orang anak Han Kit Ko selama 7 tahun. Nilai yang dikeluarkan pemerintah Inggris untuk kepentingan ini 300 dolar Spanyol setiap bulan. Dalam jangka waktu 7 tahun pemerintah Inggris mengeluarkan sejumlah 25.200 dolar Spanyol. Di samping itu masih ada tunjangan bagi anak-anak bekas tuan tanah Cina yang diberikan saat pernikahan sebesar 4.000 dolar Spanyol. Pada 16 November 1813 Rafles setuju dengan persyaratan tersebut (Bastin, 1953:439). Oleh karena itu, pemerintah Inggris sejak itu menguasai seluruh perkebunan Cina. Namun demikian, sebesar 93.974 dolar Spanyol baru diberikan 61.200 dolar Spanyol sebagai pertimbangan sementara. Sejumlah 32.774 dolar Spanyol belum dibayar oleh pemerintah Inggris. Akibatnya, para kreditur yang namanya disebut di atas mendesak pengelola perkebunan keluarga Han Kit Ko di Pasuruan, Suro Adinegoro, agar secepat mungkin melunasi hutang beserta bunganya. Besar bunga mencapai 750 dolar Spanyol sebulan setelah hampir setahun kematian Han Kit Ko. Hutang yang belum dibayar sebesar 32.774 dolar Spanyol dalam kurun waktu 16 bulan, mencapai 45.065 dolar Spanyol (ANRI, A.D. Probolinggo, No. bundel 10/1:245).

Setelah penguasaan atas tanah perkebunan Cina di Ujung Timur Jawa diambil

alih pemerintah, yang diangkat sebagai residen Besuki, Panarukan, dan Probolinggo adalah William Cotes. Bupati Besuki, Raden Tumenggung Surio Adiningrat juga merangkap sebagai Bupati Probolinggo. Pada sisi lain, dalam bidang keuangan, kasus pemberontakan 18 Mei 1813 dan pemulihan kekuasaan pemerintah atas daerah Probolinggo menjadi pukulan bagi keluarga Han Kit Ko. Hanya subsidi dan pemberian tanah negara bagi kehidupan keturunan Han Kit Ko di Pasuruan yang membantu keluarga itu lolos dari krisis. Sumber dukungan lain berasal dari keluarga bupati setempat, Raden Tumenggung Adipati Notoadiningrat. Bupati ini membantu keluarga Han Kit Ko memulai usaha gula yang sebelumnya telah ditekuni keluarga Han Kit Ko di Pasuruan sejak tahun 1799.

F. Simpulan

Terdapat perbedaan antara orang-orang Cina sebagai tuan tanah dan orang-orang Cina sebagai penguasa. Orang-orang Cina sebagai tuan tanah memperoleh tanah-tanah luas dengan cara menyewa tanah dari bupati atau pemerintah kolonial. Dalam hal ini penyewa tanah berhak menggunakan atau menguasai tanah-tanah luas atas dasar hubungan sewamenyewa atau kontrak yang disebut dengan istilah penguasaan tanah. Namun, penguasa tanah tidak memiliki hak untuk menjual kepada orang lain atau mewariskan kepada keturunannya. Sementara, Cina penguasa adalah orang-orang Cina yang diangkat sebagai penguasa oleh pemerintah kolonial karena berjasa terhadap pemerintah kolonial. Penguasa Cina punya kesempatan untuk mewariskan jabatannya kepada keturunannya sepanjang masih dikehendaki oleh VOC.

Orang-orang Cina bisa menjadi penguasa di daerah Ujung Timur Jawa, karena jasanya kepada pemerintah kolonial maupun karena kekayaannya. Han Tik Ko (Han Kit Ko), menjadi penguasa di Kabupaten Probolinggo karena telah membeli Kabupaten Probolinggo dari Gubernur Jenderal Daendels. Semula kedudukan Han Kit Ko sebagai tuan tanah, namun setelah berhasil membeli Probolinggo dari VOC dan membeli serta menduduki *dalem* kabupaten Probolinggo, dia menuntut agar

penduduk memperlakukan dia seperti penduduk bersikap kepada bupati lama, dengan segala adat dan aturan feodal. Hal ini berbeda dengan yang di Panarukan dan Besuki. Meskipun Han Tan Pit, yang masih saudara Han Kit Ko, juga menjadi tuan tanah Cina bahkan menjadi pemilik distrik Besuki dan Panarukan, ia tetap sebagai tuan tanah. Sebagai tuan tanah ia mempunyai kekuasaan yang besar layaknya penguasa-penguasa feodal, tetapi VOC tidak mengangkat Han Tjan Pit sebagai penguasa dengan gelar dan simbol-simbol kekuasaan.

Terkait proses penyewaan tanah di distrik Ujung Timur Jawa (Besuki, Panarukan, dan Probolinggo) lebih disebabkan VOC diilhami oleh praktik-praktik serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Tuan tanah Cina berhasil meningkatkan daerah tersebut menjadi daerah pertanian yang makmur dan bisa menjalin hubungan yang baik dengan penduduk pribumi. Berbekal keberhasilan tersebut, VOC meyakini bahwa hanya orang-orang Cina kaya bisa dipercaya untuk mengelola distrik-distrik di Ujung Timur Jawa yang pada saat itu masih merupakan tanah-tanah luas yang belum tergalai potensinya karena membutuhkan modal besar.

Dampak ekonomi tergantung pada bagaimana orang-orang Cina mengelola daerah di bawah kekuasaannya. Di Ujung Timur Jawa, dampaknya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Di Besuki dan Panarukan, tuan tanah Cina mengelola distrik-distrik tersebut dengan baik, meskipun mereka juga menarik pajak dan tenaga kerja. Mereka meningkatkan pertanian dengan irigasi yang baik, infrastruktur, keamanan, dan penghapusan kerja wajib di daerah sewaan, sehingga banyak penduduk dari distrik di sekitarnya khususnya Banyuwangi yang pindah ke Besuki atau Panarukan. Tindakan Han Kit Ko setelah membeli Kabupaten Probolinggo kurang simpatik dengan memecat para bawahannya yang tidak ia sukai, menarik pajak sesukanya, dan menuntut dihormati seperti

penguasa-penguasa sebelumnya, sehingga ia dibunuh dalam perlawanan 13 Mei 1813.

Dalam perjalanan historis bangsa ini, etnis Cina memainkan peran politiknya. Dalam konteks pascareformasi, ketika demokrasi dan otonomi menjadi semangat dominan, etnis Cina, pada dasarnya, mempunyai hak politik yang sama untuk menjadi pemimpin daerah. Mereka harus belajar dari sejarah agar tidak terjebak ke dalam kekuasaan tradisional, seperti yang dilakukan Han Kit Ko di Probolinggo. Keberhasilan-keberhasilan penguasa Cina di Besuki, Panarukan, dan Puger bisa menjadi contoh bagaimana etnis Cina memimpin kekuasaan politik tanpa harus merugikan kepentingan rakyat kebanyakan.

Daftar Pustaka

- ANRI, A.D. Probolinggo, Kode Inv. 23/24, No. bundel. 6 d, "Hopkins to Raffles, September, 19, 1813."
- ANRI, A.D. Besuki, Kode Inv 23/24, No. bundel 10/2, "Extract of letter D. Hopkins to Lieut. Gouv. Raffles, October 16, 1813."
- ANRI, A.D. Probolinggo, Kode Inv. 23/24. No. bundel 10/1, "Stukken Aangaande Je Particulier Landen, September, 1813."
- ANRI, A.D. Probolinggo, Kode Inv. 23/24, No. bundle 10/2, "Extract of letter from Mayor Han Kit Ko."
- ANRI, A.D. Probolinggo No. bundel 10/2, "Extract of letter from D. Hopkins Com-misioner of Probolinggo, October 1813."
- ANRI, A.D. Probolinggo, No. bundel 10/1, "Suro Adinegoro to Raffles, March 20, 1814."
- Bastin, J.S. 1953. "The Chinese Estate in East Java During The British Administration," dalam *Indonesia*. 'SGravenhage: W. van Hoeve.
- Bloch, Marc. 1976. *Feudal Society: Social Classes and Political Organisation*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd. Vol II.

- Boomgaard, Peter. 2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta: KITLV.
- Burger, D.H. 1962. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, jilid I. Jakarta: Pradnya Paramita.
- de Graaf, H.J. dkk. 1997. *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI: Antara Historis dan Mitos*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- de Graaf, H.J. dan Th. G. Th. Pigeud. 1989. *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad XV dan ke XVI*. Jakarta: Grafiti Press.
- de Jong, JKJ. 1987. *de Opkomst van het Nederlandsch gezag over Java*. Uitgeven door M L. Van Deventer. deel X.
- Elson, R.E. 1984. *Javanese Peasant and The Colonial Sugar Industry: Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940*. Singapore: Oxford University Press.
- Gonggrijp, G.F.E. 1934. *Gellustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Leiden: Leidsche Uitgeversmaatschappij.
- Hageman, Jcz. 1860. "Geschied en Aardrijkundig Overzicht van Java op het Eiende der Achttiende Eeuw," dalam *TBG*. Vol. IX.
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lekkerkerker, J. G. W. 1931. "Probolinggo, Geshiedenis en Overlevering," dalam *de Indische Gids*.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya*, jilid 1. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya (Jaringan Asia)*, jilid 2. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lorwin, Lewis L. 1931. *Exploitation Encyclopedia of The Social Science*. New York: Mac Millan. Vol. I.
- Margana, Sri. 2007. "Java's Last Frontier: The Struggle for Hegemony of Blambangan c.1763-1813," Thesis. Leiden: Universiteit Leiden.
- Mashoed, Mohammad. 2004. *Sejarah dan Budaya Bondowoso*. Surabaya: Papyrus.
- Nagtegaal, Luc. 1996. *Riding The Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java 1680-1743*. Leiden: KITLV Press.
- Nawiyanto. 2007. "Environmental Change In A Frontier Region of Java: Besuki. 1870-1970." Thesis. Canberra: The Australian National University.
- Nijhoff, Martinus. 1919. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Tweede druk Derde deel*. Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Oetomo, Sri Adi. 1987. *Kisah Perjuangan Menegakkan Kerajaan Blambangan*. Surabaya: Penerbit Sinar Wijaya.
- Ong Hok Ham. 1983. *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Petition of Han Tan Pit, May 26, 1913, Bengal Civil Colonial Consultations, March 19, 1814, dalam J.S. Bastin. 1954. *The Development of Raffles Idea on The Land System in Java and The Work of The Mackenzie Land Tenure Commission*. Gravenhage: H.L. Smiths.
- Pigeud. Th. G. Th. 1932. "Aanteekeningen Betreffende den Javaanschen Oosthoek," dalam *TBG*, LXXII.
- Pusat Bahasa Depdiknas, 2002. *Babad Besuki: Suntingan Teks dan Terjemahan*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Rapport van het Regentschap Poeger, MS-AN, Kode Besoeki.
- Reis Van G.G. 1853. "van Imhoff over Java in het Jaar 1746," *Bijdragen Tot de Tall-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch Indie*, No.1, 1853.
- Rouffaer. 1931. "Vorstenlanden," *Adatrechbundel*, 34.
- Sutjipto, FA. 1983. "Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai Medio Abad XIX)." Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Budaya.
- Wijayanti, Putri Agus. 2001. *Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*. Yogyakarta: Tarawang.
- Wolf, Eric. 1983. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: CV Rajawali. RE-